



## Interaksi Agama dan Politik di Indonesia

Akmal<sup>1</sup>, Sunita Br. Sianipar<sup>2</sup>, Nesi Surdikina<sup>3</sup>, Yessica Devina Hutabarat<sup>4\*</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 10, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted May 26 2024

Available online 01 June 2024

#### Keywords:

Agama, Politik, Pluralisme

#### Keywords:

Religion, Politics, Pluralism



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Relasi antara agama dan politik di Indonesia merupakan topik yang signifikan dan kompleks, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun juga memiliki keragaman agama yang luas. Jurnal ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara agama dan politik dengan fokus pada isu-isu kontemporer seperti peran partai politik berbasis agama, pengaruh agama dalam kebijakan publik, dan tantangan pluralisme di era demokrasi. Melalui analisis literatur dan studi kasus, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak, tantangan, dan implikasi dari interaksi antara agama dan politik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa agama memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia, baik melalui partai politik maupun kebijakan publik, tetapi juga menghadapi tantangan dalam menjaga pluralisme dan toleransi. Kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan pandangan baru bagi peneliti, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum dalam upaya membangun demokrasi yang inklusif dan toleran.

### ABSTRACT

*The relationship between religion and politics in Indonesia is significant and complex, given that Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world, yet also has a broad religious diversity. This journal explores the dynamics of the interaction between religion and politics, focusing on contemporary issues such as the role of religion-based political parties, the influence of religion in public policy, and the challenges of pluralism in the democratic era. Through literature analysis and case studies, this journal aims to identify the impacts, challenges, and implications of the interaction between religion and politics in Indonesia. This research finds that religion has a significant influence on Indonesian politics, both through political parties and public policy, but also faces challenges in maintaining pluralism and tolerance. The conclusions and recommendations generated are expected to provide new insights for researchers, policymakers, and the general public in efforts to build an inclusive and tolerant democracy.*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan sekitar 87% dari total penduduknya memeluk agama Islam. Namun, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang signifikan, termasuk pemeluk Kristen (Protestan dan Katolik), Hindu, Buddha, dan Konghucu. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, terdapat pula berbagai kepercayaan lokal yang masih dianut oleh beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah. (Bush et al, 2014).

Relasi antara agama dan politik di Indonesia telah menjadi topik perdebatan panjang, terutama sejak era reformasi pada akhir 1990-an yang membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik dari berbagai kelompok agama. Sebelum era reformasi, di masa Orde Baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto cenderung mengontrol aktivitas keagamaan dengan ketat untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan. Setelah jatuhnya rezim Soeharto, terjadi perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia yang memungkinkan kelompok-kelompok agama untuk lebih bebas mengekspresikan pandangan mereka dan berpartisipasi dalam proses politik (Hefner, 2016).

Era reformasi ditandai dengan kebangkitan demokrasi dan peningkatan partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok agama. Reformasi ini membuka pintu bagi partai politik berbasis agama untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang berbasis Islam, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang juga memiliki basis Islam, adalah contoh partai-partai yang memainkan peran penting dalam politik Indonesia pasca-reformasi. Selain partai-partai

\*Corresponding author

Email: [yessicadvnhtbrt@gmail.com](mailto:yessicadvnhtbrt@gmail.com)

berbasis Islam, partai-partai berbasis agama lain, seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis Kristen, juga muncul dalam lanskap politik Indonesia. Pengaruh agama dalam kebijakan publik di Indonesia sangat terasa dalam berbagai aspek (Mietzner, 2014). Contoh nyata adalah penerapan hukum syariah di beberapa daerah, seperti di Provinsi Aceh, yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan moralitas publik, seperti UU Pornografi dan UU Perkawinan, mencerminkan pengaruh kuat dari kelompok-kelompok agama dalam proses legislasi. Misalnya, UU Perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan di Indonesia harus sesuai dengan hukum agama masing-masing pasangan, yang menegaskan pentingnya agama dalam aspek-aspek hukum dan sosial. Meskipun agama memainkan peran penting dalam politik Indonesia, interaksi antara agama dan politik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan terbesar adalah menjaga pluralisme dan toleransi di tengah keberagaman agama. Kasus-kasus intoleransi agama, seperti penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi agama minoritas dan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, menunjukkan adanya gesekan yang dapat mengancam kerukunan beragama. Kasus Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi contoh bagaimana isu agama dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik dan memecah belah masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempromosikan dialog antaragama dan kolaborasi dalam menciptakan kebijakan yang inklusif. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kerukunan antarumat beragama, seperti membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat nasional dan daerah. FKUB bertujuan untuk menjadi wadah dialog antaragama dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan (Aspinall et al, 2019).

Relasi antara agama dan politik di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dan sering kali kontroversial. Di satu sisi, agama memberikan nilai moral dan etika yang dapat memperkuat politik dan kebijakan publik. Di sisi lain, politisasi agama dapat memicu konflik dan mengancam kerukunan antarumat beragama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme. Upaya ini termasuk memperkuat hukum yang mendukung toleransi, meningkatkan pendidikan multikultural, dan mendorong dialog antaragama. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elit tertentu (Buehler, 2016).

## LANDASAN TEORI

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan juga memiliki keragaman agama yang signifikan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengelola hubungan antara agama dan politik. Pemisahan yang jelas antara agama dan politik menjadi isu penting, mengingat peran agama yang dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Menurut teori sekularisme, agama dan politik harus dipisahkan, di mana agama tidak seharusnya mempengaruhi kebijakan publik dan urusan negara (Mujani et al, 2018).

### a. Teori Sekularisme

Teori sekularisme mendukung pemisahan institusi keagamaan dari institusi negara (Hamayotsu, 2014). Menurut Bruce (2011), sekularisme bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan hukum negara didasarkan pada prinsip-prinsip rasional dan universal yang dapat diterima oleh semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka. Prinsip dasar sekularisme mencakup netralitas negara terhadap semua agama, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu dari campur tangan agama dalam urusan publik. Implementasi sekularisme dalam kebijakan publik berarti bahwa keputusan pemerintah mengenai isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan hukum perdata harus bebas dari pengaruh agama tertentu. Hal ini untuk mencegah diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama mereka. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kebijakan pemerintah harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Di Indonesia, agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan sering kali memainkan peran dalam proses politik. Contohnya adalah penerapan hukum syariah di beberapa daerah dan pengaruh kelompok agama dalam kebijakan moralitas publik seperti UU Pornografi. Pengaruh ini sering kali mengakibatkan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai agama tertentu, yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi kelompok agama lain atau mereka yang tidak beragama.

Resistensi terhadap sekularisme sering datang dari kelompok agama yang merasa bahwa nilai-nilai agama mereka harus menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan publik. Misalnya, lobi kuat dari kelompok Islam konservatif telah berhasil mempengaruhi sejumlah kebijakan, termasuk penolakan terhadap RUU yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan tantangan bagi

upaya untuk menerapkan sekularisme secara penuh. Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus yang memungkinkan penerapan hukum syariah. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan publik, termasuk kode berpakaian, perilaku sosial, dan penegakan moralitas publik. Implementasi hukum syariah di Aceh sering kali dipandang sebagai contoh bagaimana agama dapat mempengaruhi kebijakan publik secara signifikan. Meskipun diterapkan dengan tujuan menjaga moralitas publik, penerapan hukum syariah juga menimbulkan kritik karena dianggap mengabaikan hak-hak individu dan menciptakan diskriminasi terhadap minoritas agama dan perempuan (Mietzener et al, 2021).

Pemisahan antara agama dan politik di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan menantang. Teori sekularisme menawarkan kerangka kerja untuk memahami pentingnya pemisahan ini guna memastikan bahwa kebijakan publik tidak didominasi oleh nilai-nilai agama tertentu. Namun, implementasi sekularisme menghadapi tantangan dari pengaruh agama yang kuat dalam kehidupan publik dan resistensi dari kelompok-kelompok agama. Untuk mencapai pemisahan yang efektif, diperlukan upaya pendidikan, reformasi hukum, dan dialog antaragama yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih adil, inklusif, dan menghormati keragaman agama di Indonesia (Van, 2013).

#### b. Teori Pluralisme Agama

Teori pluralisme agama menekankan pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam masyarakat. Dalam konteks politik, teori ini mendorong pengakuan dan penghormatan terhadap semua agama dalam pembuatan kebijakan publik. Pluralisme memastikan bahwa tidak ada agama tertentu yang mendominasi proses politik, melainkan semua agama dapat berpartisipasi secara setara. Dengan demikian, pluralisme agama berusaha menciptakan masyarakat di mana berbagai kepercayaan dan keyakinan dapat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Dalam kebijakan publik, pluralisme agama berarti bahwa pemerintah harus mengakui dan menghormati keragaman agama di masyarakat. Kebijakan yang dihasilkan harus adil dan tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama apapun. Misalnya, dalam sistem pendidikan, kurikulum harus mencerminkan berbagai agama yang ada di Indonesia dan menghormati hak setiap siswa untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Indonesia, sebagai negara dengan beragam agama, menghadapi tantangan unik dalam menerapkan pluralisme agama. Pancasila, sebagai dasar negara, menjunjung tinggi prinsip ketuhanan yang maha esa, yang dapat diinterpretasikan sebagai dukungan terhadap pluralisme agama. Ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang menghormati hari-hari besar agama yang berbeda dan memberikan ruang bagi berbagai agama untuk berpartisipasi dalam acara-acara kenegaraan. Contoh lain adalah adanya lembaga-lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk untuk memfasilitasi dialog antaragama dan membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. FKUB memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi dan kerjasama antar berbagai kelompok agama di tingkat lokal dan nasional. Meskipun prinsip pluralisme agama diakui secara luas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok yang menginginkan penerapan hukum berdasarkan satu agama tertentu, yang dapat mengancam prinsip inklusivitas. Selain itu, insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas agama menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pluralisme agama secara penuh (Feener et al, 2017).

Pendidikan memainkan peran kunci dalam mendukung dan mempromosikan pluralisme agama. Melalui pendidikan, masyarakat dapat diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan agama. Kurikulum yang inklusif dan program pendidikan yang menekankan toleransi antaragama dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta membangun masyarakat yang lebih harmonis. Teori pluralisme agama menekankan pentingnya keberagaman dan inklusivitas dalam konteks politik dan kebijakan publik. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip pluralisme agama dihadapkan pada tantangan yang signifikan, tetapi juga menunjukkan potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Dengan mempromosikan pendidikan yang inklusif dan membentuk lembaga-lembaga yang mendukung dialog antaragama, Indonesia dapat terus bergerak menuju realisasi pluralisme agama yang sejati (Menchik, 2016).

#### c. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme struktural melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Dalam konteks agama dan politik, fungsionalisme struktural menekankan bagaimana institusi agama berfungsi untuk memberikan legitimasi moral kepada pemerintah dan membantu mengintegrasikan masyarakat. Menurut Parsons (1951), institusi agama menyediakan nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung keteraturan sosial dan stabilitas politik (Hadiz, 2016).

Di Indonesia, agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan legitimasi moral bagi pemerintah. Banyak kebijakan dan keputusan politik yang didasarkan atau dibenarkan oleh nilai-nilai

agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Misalnya, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah sering kali menyertakan referensi ke agama untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik. Hal ini terlihat dalam penggunaan istilah-istilah religius dalam retorika politik untuk menggali dukungan masyarakat dan memperkuat otoritas politik. Selain memberikan legitimasi moral, agama juga berperan dalam membentuk identitas nasional di Indonesia. Pancasila, sebagai ideologi negara, mengakui keberadaan dan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mencerminkan komitmen negara terhadap nilai-nilai religius yang menjadi dasar persatuan nasional. Agama digunakan sebagai alat untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya di Indonesia, yang secara historis beragam. Fungsionalisme struktural juga melihat agama sebagai instrumen integrasi sosial. Institusi keagamaan seperti masjid, gereja, pura, dan vihara berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial yang menghubungkan individu dalam komunitas mereka. Kegiatan keagamaan seperti perayaan hari besar, upacara adat, dan ritual keagamaan berkontribusi pada pembentukan solidaritas sosial dan identitas kolektif. Misalnya, perayaan Idul Fitri dan Natal di Indonesia tidak hanya menjadi momen religius tetapi juga momen kebersamaan sosial yang memperkuat ikatan antarwarga negara (Barton, 2015).

Di Indonesia, agama sering digunakan untuk mendukung stabilitas politik. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemimpin agama untuk mengelola isu-isu sosial dan politik yang sensitif. Dalam situasi krisis, pemimpin agama sering kali diminta untuk memberikan dukungan moral dan menenangkan masyarakat. Misalnya, pada saat-saat krisis politik atau kerusuhan sosial, pemimpin agama memainkan peran penting dalam mediasi dan penyelesaian konflik (Hosen, 2016). Meskipun agama dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial, implementasinya tidak selalu mulus. Terdapat tantangan ketika nilai-nilai agama tertentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau hak asasi manusia. Misalnya, penerapan hukum syariah di beberapa daerah sering kali menimbulkan kontroversi terkait hak-hak perempuan dan minoritas. Selain itu, politisasi agama dapat menyebabkan polarisasi sosial dan konflik sektarian, yang justru mengancam stabilitas politik. Teori fungsionalisme struktural menyoroti bagaimana agama dan politik bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial di Indonesia. Agama memberikan legitimasi moral bagi pemerintah, membantu membentuk identitas nasional, dan berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial. Meskipun demikian, ada tantangan signifikan dalam implementasi praktis, terutama terkait dengan konflik antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Memahami peran kompleks agama dalam politik Indonesia melalui lensa fungsionalisme struktural membantu mengidentifikasi cara-cara di mana stabilitas dan kohesi sosial dapat dipertahankan sambil mengatasi tantangan yang ada (Pepinsky, 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus. Sumber data berasal dari artikel jurnal, laporan kebijakan, dan berita terkini yang relevan dengan topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partai politik berbasis agama memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia. Partai-partai ini tidak hanya mewakili aspirasi umat beragama tetapi juga berusaha menerapkan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik (Warbuton, 2018). Dua contoh utama dari partai politik berbasis agama adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PKS merupakan salah satu partai Islam terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1998, PKS bertujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam politik Indonesia. Partai ini dikenal karena disiplin kadernya dan program-program sosial yang kuat. PKS seringkali memperjuangkan isu-isu seperti penegakan syariah, penolakan terhadap pornografi, dan kebijakan pro-keluarga. Selain itu, PKS juga aktif dalam menggali dukungan di kalangan umat Islam perkotaan dan memiliki basis massa yang loyal. PPP adalah partai politik berbasis Islam yang didirikan pada tahun 1973 sebagai hasil fusi dari beberapa partai Islam. Partai ini berfokus pada penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan sering kali berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mendapatkan pengaruh politik yang lebih besar. PPP memiliki basis massa yang kuat di kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan yang religius. Kebijakan PPP sering kali mencerminkan pandangan konservatif terhadap isu-isu sosial, seperti penolakan terhadap legalisasi LGBT dan dukungan terhadap hukum syariah di daerah-daerah tertentu.

### **a. Pengaruh Agama dalam Kebijakan Publik**

- a) Salah satu contoh nyata dari pengaruh kuat kelompok agama dalam kebijakan publik adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini mendapat dukungan besar dari partai-partai berbasis agama dan organisasi massa Islam. UU Pornografi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi, namun juga mendapat kritik karena

dianggap terlalu ketat dan mengancam kebebasan berekspresi serta hak-hak perempuan. Kritik juga datang dari kelompok yang menilai UU ini bisa disalahgunakan untuk menargetkan minoritas seksual dan budaya.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan pengaruh kelompok agama dalam proses legislasi di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek perkawinan termasuk batas usia minimal untuk menikah dan poligami. Perubahan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan disahkannya revisi yang menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya adalah 16 tahun bagi perempuan. Revisi ini didorong oleh kekhawatiran akan tingginya angka pernikahan anak, namun tetap dalam kerangka nilai-nilai agama yang kuat (Picard et al, 2017).
- b. Tantangan Pluralisme: Kasus Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017
- a) Kasus Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, pada Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh paling mencolok bagaimana isu agama dapat memecah belah masyarakat dan menantang prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi. Ahok, seorang Kristen Tionghoa, dituduh melakukan penistaan agama setelah mengutip ayat Al-Qur'an dalam salah satu pidatonya. Tuduhan ini memicu protes besar-besaran yang dikenal sebagai aksi "Bela Islam" dan akhirnya Ahok dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun (Rahmat, 2022).
  - b) Kasus Ahok menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat politik untuk menggalang dukungan dan mendiskreditkan lawan. Isu ini membelah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan dan meningkatkan ketegangan antaragama. Selain itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan berpendapat di Indonesia serta menantang upaya untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi di tengah masyarakat yang beragam (Burhanuddin, 2019).

Relasi antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan beragam. Partai politik berbasis agama seperti PKS dan PPP memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan publik, seringkali berdasarkan nilai-nilai agama. Kebijakan seperti UU Pornografi dan UU Perkawinan mencerminkan bagaimana nilai-nilai agama diintegrasikan dalam regulasi negara. Namun, tantangan terhadap pluralisme dan toleransi, seperti yang terlihat dalam kasus Ahok, menunjukkan bahwa agama juga dapat menjadi sumber konflik dan polarisasi dalam masyarakat. Untuk mencapai harmoni, diperlukan upaya terus-menerus untuk menghormati keragaman dan mempromosikan inklusivitas dalam proses politik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa agama memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia. Namun, pengaruh ini tidak selalu positif. Di satu sisi, agama dapat memberikan moralitas dan etika dalam politik. Di sisi lain, politisasi agama dapat memicu konflik dan mengancam kerukunan antarumat beragama. Relasi antara agama dan politik di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks dan sering kali kontroversial. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menemukan keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme. Upaya ini termasuk memperkuat hukum yang mendukung toleransi, meningkatkan pendidikan multikultural, dan mendorong dialog antar agama (Aspinall, 2020).

## SIMPULAN

Relasi antara agama dan politik di Indonesia sangat kompleks dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, hukum, hingga ekonomi. Partai politik berbasis agama, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memainkan peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai religius. Partai-partai ini mempengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan yang sering kali mencerminkan dominasi nilai-nilai moral agama dalam proses politik. Contoh nyata dari pengaruh ini dapat dilihat dalam legislasi seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Perkawinan, yang menonjolkan nilai-nilai agama dalam regulasi negara. Pengaruh agama dalam politik juga terlihat dalam berbagai kasus yang menguji pluralisme dan toleransi di Indonesia. Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah salah satu contoh signifikan bagaimana isu-isu agama dapat memecah belah masyarakat dan menantang prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Tuduhan penistaan agama terhadap Ahok memicu protes besar-besaran dan menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan sebagai alat politik untuk memobilisasi massa dan mendiskreditkan lawan politik. Selain itu, pengaruh kuat dari kelompok agama dalam proses legislasi mencerminkan ketegangan yang sering kali muncul antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip demokrasi modern, seperti kebebasan berekspresi dan hak-hak individu. Keputusan-keputusan politik yang didorong oleh pertimbangan agama dapat memperdalam polarisasi di dalam masyarakat dan mengakibatkan marginalisasi kelompok-kelompok minoritas agama. Untuk mengatasi

tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi antara sektor agama dan politik. Penegakan hukum yang kuat dan partisipatif, serta peningkatan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, adalah langkah-langkah krusial yang perlu diambil. Lebih lanjut, penelitian yang mendalam dan berkelanjutan mengenai dinamika agama dan politik di Indonesia sangat diperlukan. Studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki karakteristik serupa dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami bagaimana isu-isu pluralisme dan integrasi agama dalam politik dikelola di berbagai konteks. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, serta memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan semua kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok mayoritas atau elit tertentu, Indonesia dapat membangun tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu tetapi juga memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## REKOMENDASI

1. Penelitian selanjutnya perlu fokus pada mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam interaksi antara agama dan politik. Penegakan hukum yang adil dan partisipatif akan membantu mengurangi korupsi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
2. Melakukan studi komparatif antara Indonesia dan negara-negara lain dengan dinamika agama-politik yang serupa dapat memberikan wawasan berharga. Hal ini akan membantu memahami bagaimana berbagai negara menangani isu-isu pluralisme dan integrasi agama dalam politik.
3. Mengkaji peran media sosial dalam menyebarkan dan memperkuat narasi agama dalam politik sangat penting. Media sosial sering kali menjadi platform utama untuk mobilisasi massa dan kampanye politik berbasis agama, sehingga pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini akan sangat berharga.
4. Penelitian lebih lanjut perlu menggali bagaimana kelompok agama minoritas berpartisipasi dalam politik dan bagaimana hak-hak mereka dilindungi. Ini penting untuk memastikan inklusivitas dan keberagaman dalam politik Indonesia.
5. Meneliti dampak kebijakan berbasis agama terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk dampak ekonomi dan sosial, akan membantu dalam membuat kebijakan yang lebih adil dan merata. Ini juga akan membantu mengidentifikasi potensi diskriminasi dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.
6. Pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu diperkuat. Penelitian bisa mengkaji efektivitas program-program pendidikan ini dalam mengurangi polarisasi dan meningkatkan harmoni sosial.

## REFERENSI

- Afrizal, Teuku Yudi, and T. Saifullah. "Legal Certainty in Customary Jurisdictions (Case Study In Muara Batu District, North Aceh)." *SASI* 29.1 (2023): 75-84.
- Aksa, F. N., Saifullah, T., & Farabi, A. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 8(1), 16-33.
- Aspinall, E. (2020). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.
- Barton, G. (2015). Indonesia's Year of Voting Dangerously: Consolidation and Exclusion in 2014's Legislative and Presidential Elections. *Asian Studies Review*, 39(3), 375-392.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Burhanuddin, J., & van Dijk, K. (2019). *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations*. Amsterdam University Press.
- Bush, R., & Fealy, G. (2014). *The Political Economy of Islamic Law: Sharia and the State in the 21st Century*. The Asia Foundation.
- Feener, R. M., & Cammack, M. E. (Eds.). (2017). *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Harvard University Asia Center.
- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.
- Hamayotsu, K. (2017). The Limits of Civil Society in Democratic Indonesia: Media Freedom and Religious Intolerance. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4), 623-644.
- Hefner, R. W. (2016). *Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World*. Indiana University Press.
- Hosen, N. (2016). *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.
- Mietzner, M. (2014). Political Conflict and Democracy in Indonesia: Recent Developments and Long-term Trends. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33(2), 3-22.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2021). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Asian Studies Review*, 45(1), 13-30.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2018). *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press.
- Pepinsky, T. B. (2019). Islam, Ethnicity, and Economic Inequality in Indonesia. *Asian Survey*, 59(2), 243-268.
- Picard, M., & Madinier, R. (Eds.). (2017). *The Politics of Religion in Indonesia: Syncretism, Orthodoxy, and Religious Contention in Java and Bali*. Routledge.
- Rahmat, M. Z. (2022). Political Islam and the 2019 Presidential Election in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 44(1), 34-52.
- Saifullah, T., & Alfikri, A. (2023). Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren Al-Urwatul Wustqa Muara Batu, Aceh Utara. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(2).
- Van Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Warburton, E. (2018). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 297-320.